



Pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sangiasseri

Muhammad Amar^{1*}, Andi Nur Akbar², Makmur²

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

Alamat: Jln. Sultan Hasanuddin No. 20 Balangnipa Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: amarkputrapratama@gmail.com*

Abstract. The BPNT problem which eventually became the background of the research problem began when researchers were visiting one of the food distribution places in Sangiasseri Village in early February 2020, this market is one of the places where the community receives assistance, when researchers conducted research at the place where the community received assistance, researchers listened to residents' complaints where the assistance they received varied, some received IDR 300,000 and some received IDR 600,000. The community explained that the non-cash food assistance program received was usually charged by the management, there were also delays in disbursement where residents received once every three months which became a problem in the BPNT program. In its implementation, the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program experienced inaccurate targeting where financially capable families received assistance, while poor families did not. So that the socio-economic welfare of beneficiaries has not increased Non-Cash Food Assistance (BPNT) in the socio-economic welfare of beneficiaries, researchers discuss the running of the implementation of BPNT from the Sub-district, Village, RW and RT, BPNT Facilitators, and E-Warong and present findings on obstacles in the BPNT implementation system in the welfare of underprivileged families in Sangiasseri village.

Keywords: Management, Assistance, and Welfare.

Abstrak. Permasalahan BPNT yang akhirnya menjadi latar belakang permasalahan penelitian berawal dimana peneliti sedang berkunjung disalah satu tempat pembagian sembako yang berada di Kelurahan Sangiasseri diawal Februari 2020, pasar ini merupakan salah satu tempat masyarakat menerima bantuan, ketika peneliti melakukan penelitian di tempat masyarakat menerima bantuan, peneliti mendengarkan keluh kesah warga dimana bantuan yang mereka dapatkan berbeda-beda, ada yang menerima Rp300.000 dan ada juga yang menerima Rp600.000. Masyarakat menjelaskan bahwa program bantuan pangan non tunai yang diterima baisanya di kenakan potongan oleh pengurus, adanya keterlambatan pencairan juga dimana warga menerima tiga bulan sekali menjadi permasalahan didalam program BPNT. Dalam pelaksanaannya, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengalami ketidakupasan dimana keluarga yang mampu dari segi finansial justru mendapatkan bantuan, sedangkan keluarga yang tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan. sehingga kesejahteraan sosial ekonomi penerima manfaat belum mengalami peningkatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam mensejahterakan sosial ekonomi penerima manfaat, peneliti membahas berjalannya pelaksanaan BPNT dari Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT, Pendamping BPNT, dan E-Warong serta memamparkan temuan –temuan pada kendala – kendala disistem pelaksanaan BPNT dalam mensejahterakan keluarga kurang mampu di kelurahan Sangiasseri.

Kata kunci: Pengelolaan, Bantuan, dan Kesejahteraan.

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan di Indonesia yang sulit diatasi, kenaikan harga bahan pangan pun menjadi faktor meningkatnya kemiskinan yang terjadi, kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum, hak rakyat untuk memperoleh rasa aman, hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan dasar (Sandang, Pangan, Papan) yang terjangkau, hak rakyat untuk memperoleh Pendidikan, memperoleh kebutuhan kesehatan, Keadilan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan

pemerintahan, berinovasi, menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan dan untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik. (Shahdan, 2005).

Pemerintah dalam upaya mengatasi kemiskinan salah satunya adalah memberikan bantuan sosial guna mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, salah satunya adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui mekanisme uang elektronik yang hanya untuk membeli pangan guna mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan meningkatkan gizi serta membantu dalam mensejahterakan penerima manfaat. BPNT ini juga merupakan program transformasi program rastra untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program BPNT telah dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 dan terus diperluas ke wilayah-wilayah lainnya sampai saat ini (Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, 2019).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diatur dalam PPRI No. 63 Tahun 2017. Program ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Maret, April, Juni 2016, secara resmi bantuan ini diluncurkan pertama kali pada 12 Februari 2017 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama dengan PT Bank Negara Indonesia di Surabaya dan Lamongan, Jawa Timur (Kiryanto, 2017).

Permasalahan BPNT yang akhirnya menjadi latar belakang permasalahan penelitian berawal dimana peneliti sedang berkunjung disalah satu tempat pembagian sembako yang berada di Kelurahan Sangiasseri diawal Februari 2020, pasar ini merupakan salah satu tempat masyarakat menerima bantuan, ketika peneliti melakukan penelitian di tempat masyarakat menerima bantuan, peneliti mendengarkan keluh kesah warga dimana bantuan yang mereka dapatkan berbeda-beda, ada yang menerima Rp300.000 dan ada juga yang menerima Rp600.000. Masyarakat menjelaskan bahwa program bantuan pangan non tunai yang diterima baisanya di kenakan ptongan oleh pengurus, adanya keterlambatan pencairan juga dimana warga menerima tiga bulan sekali menjadi permasalahan didalam program BPNT.

Dalam pelaksanaannya, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengalami ketidaktepatan sasaran dimana keluarga yang mampu dari segi finansial justru mendapatkan bantuan, sedangkan keluarga yang tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan. sehingga kesejahteraan sosial ekonomi penerima manfaat belum mengalami peningkatan. Kesejahteraan sudah merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia termasuk fakir miskin yang dituangkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat 1 a tentang Jaminan Sosial yang berisi “Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar,

lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi". Didasari pada UU tersebut, penerima manfaat dijamin hak – hak kebutuhan dasarnya melalui penyelenggaraan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), namun yang terjadi dilapangan, pelaksanaan BPNT belum sesuai dimana disetiap prosesnya mengalami ketidakberfungsiannya peran, masih adanya pihak–pihak yang mencampuri pelaksanaan dan tidak bertanggung jawab memotong bantuan dari penerima manfaat dengan banyak alasan yang berdampak pada berkurangnya nominal yang diterima oleh penerima manfaat, belum maksimalnya kinerja pihak – pihak yang terlibat yang menyebabkan penerima manfaat tidak mengetahui informasi dan tiba tiba diinformasikan untuk mengantri di tempat pencairan, beberapa penerima manfaat yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan terus memberikan dalih dan uang terimakasih kepada oknum agar bantuan yang diterimanya tidak dialihkan ke penerima manfaat lain yang masuk dalam kategori layak menerima BPNT, tentu ini adalah satu masalah pada program tersebut. Kondisi keluarga yang menerima bantuan adalah keluarga yang kondisi sosial ekonominya 25% di daerah pelaksanaan, namun yang terjadi di lapangan bahwa keluarga yang kondisi sosial ekonominya di atas 25% juga mendapatkan bantuan.

Program BPNT memiliki teknis dimana pencairan dilakukan di E Warong, E Warong merupakan agen yang bekerja sama dengan Bank Mandiri yang mempunya fungsi/peran untuk mencairkan BPNT yang berupa uang yang dicairkan melalui mesin EDC khusus program pemerintah, kemudian setelah mendapatkan nominal uang yang didapat, penerima manfaat menukar uang tersebut dengan bahan pangan, dalam pelaksanaannya ini kerap kali pihak E Warong pun memainkan harga bahan pangan sehingga harga dari bahan pangan yang ingin dibeli oleh penerima manfaat lebih mahal, dari sistem pencairan yang dilakukan di E Warong pun, ada oknum yang memanipulasi informasi pencairan dan tidak menunjukkan bukti transaksi dari mesin EDC serta memberikan ancaman jika penerima manfaat tidak patuh akan informasi tersebut maka bantuan akan dicabut.

Berdasarkan banyaknya permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan program bantuan di Kelurahan Sangiasseri terkait ketidaktepatan sasaran sehingga penerima manfaat belum mendapatkan hak-hak kebutuhan dasar dan bagaimana pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam mensejahterakan sosial ekonomi penerima manfaat, peneliti membahas berjalannya pelaksanaan BPNT dari Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT, Pendamping BPNT, dan E Warong serta memamparkan temuan – temuan pada kendala – kendala disistem pelaksanaan BPNT dalam mensejahterakan keluarga kurang mampu di kelurahan Sangiasseri

2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif, kemudian penelitian dilakukan dilaksanakan pada bulan maret 2024, adapun lokasi penelitian yaitu di kelurahan sangiasseri. Dengan metode pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara dan observasi dengan jumlah key informan yaitu lurah, masyarakat, dan pelaksana. Etelah data dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Dalam pengelolaan BPNT banyak pihak yang berperan dalam pengelolaan perencanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pihak yang berperan dalam proses perencanaan ada Pak Lurah, Pendamping, Agen dan Masyarakat. penggerakan dalam menyalurkan BPNT itu harus melalui tahapan sebelum menerima bantuan pihak Agen di infokan oleh Bank bahwa saldo sudah masuk kemudian pihak Agen menyampaikan ke masyarakat yang menerima bantuan. Dengan menganalisa hasil wawancara sesuai indikator bahwa untuk perencanaan bisa dikatakan sudah optimal karena dalam proses Pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sangiasseri unsur peyelenggaraan itu sendiri telah melaksanakan sesuai dengan peraturan dari Kemensos yang menjadi acuan. Dan juga tugas dan tanggung jawab yang melibatkan antara Dinas Sosial Kabupaten Sinjai dan Pemerintah Kelurahan Sangiasseri dan juga Agen, Pendamping beserta Keluarga Penerima Masyarakat (KPM) sudah berjalan sesuai dengan rencana yang ada.

Pengorganisasian

Pemerintah setempat dan pihak pelaksana dalam pengelolaan program ini harus memberikan dukungan dan memberikan pelayanan baik. Koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah setempat dan para pelaksana yang turut memantau proses penyaluran BPNT tersebut. Maksimal atau tidaknya sebuah kebijakan pengelolaan itu juga ditentukan oleh sikap pelaksana dan pemerintah setempat, adanya sebuah dukungan yang diberikan oleh pemerintah ataupun tingkat kemauan yang tinggi yang dimiliki oleh pihak pelaksana itu akan membantu memaksimalkan proses berjalannya sebuah Pengelolaan. Karena itu,

pelaksana kebijakanharuslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian BPNT dalam Proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat dibutuhkan pengorganisasian yang baik dari pihak pelaksana dari kabupaten sampai pada kelurahan yang menyalukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal ini adalah masyarakat miskin yang menjadi objek dalam program BPNT. dalam proses penyalurannya pihak kelurahan tidak terlibat dalam melakukan penyaluran, karena semua penyaluran sudah ada Agen, Pendamping yang terlibat dalam penyalurannya dan adapun warga yang tidak mengambil bantuannya maka dari pihak pendamping akan menyampaikan kepada RT atau Kepala Lingkungan untuk mencari KPM yang tidak mencairkan bantuan tersebut. Pihak yang berperan dalam proses perencanaan ada Pak Lurah, Pendamping, Agen dan Masyarakat.

Penggerakan

Hal mendasar dalam penggerakan adalah manajemen yang berpandangan progresif, maksudnya para pimpinan harus menunjukkan sikap teladan dan keputusan-keputusan mereka bahwa mereka mempunyai perhatian terhadap anggota-anggota yang ada dalam suatu lembaga. Dalam hal ini penggerakkan lebih ditujukan tentang bagaimana seorang pimpinan lembaga bisa menggerakkan kepengurusannya untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Adapun mekanisme penggerakan penyaluran program BPNT dilakukan melalui tahap yaitu, pertama registrasi dana atau pembukaan rekening, awalnya dilakukan pemberitahuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Agen, Pendamping, maupun Kelurahan dan Dinas Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kedua, edukasi dan sosialisasi, dilakukan setelah registrasi dan pembukaan rekening yang dimana diberikan untuk KPM, pendamping dan aparat pemerintah daerah kota Sinjai dilaksanakan pada saat bersamaan dengan distribusi, pengecekan keberadaan KPM dan pengaktifan Kartu Keluarga Sejahtera. Ketiga, penyaluran BPNT, proses penyaluran BPNT dilakukan oleh Bank Mandiri selaku Bank penyalur yang digunakan oleh KPM dan diberikan tanpa dikenakan biaya. Pihak yang berperan dalam proses perencanaan ada Pak Lurah, Pendamping, Agen dan Masyarakat.

Pengawasan

Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana. Pengawasan ataupun pendampingan penyaluran BPNT harus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka dari itu dibentuk Pendamping Sosial Bantuan Pangan

Kecamatan (PSBPK) atau yang akrab disebut pendamping yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kab. Sinjai adalah salah satu pelaksana di dalam BPNT yang memiliki beberapa peran dan tanggung jawab. Dalam pengawasan pengelolaan BPNT banyak pihak yang berperan dalam pengelolaan perencanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pihak yang berperan dalam proses perencanaan ada Pak Lurah, Pendamping, Agen dan Masyarakat

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penyusunan perencanaan sudah tepat, dapat dilihat bahwa penyusunan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sinjai beserta pihak Kantor Kelurahan Sangiaserri mengenai pengelolaan sudah berjalan dengan baik dimana dapat kita lihat dari tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan dan juga konsistensi dalam penyelenggaraan sudah maksimal. Pengorganisasian (*Organizing*), Tingkat pengorganisasian dari proses pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menunjukan sudah optimal dengan yang direncanakan, karena sudah sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ada dan juga pada setiap tahapan penyelenggaraanya selalu melakukan koordinasi dengan penyelenggara di Kabupaten untuk mekanisme dan proseduralnya. Penggerakan (*Actuating*), dalam pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terkhusus pada penggerakannya yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Pihak Dinas Sosial Kabupaten Sinjai yang berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Sangiaserri bisa dikatkan masih belum optimal meskipun pelaksanaanya sudaah sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi masih ada masalah yang timbul dalam penyalurannya yaitu, keterlambatan penyaluran kepada penerima BPNT. Pengawasan (*Controlling*), pengawasan ataupun pendampingan penyaluran BPNT sudah berjalan dengan baik karena sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan aktivitas pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan di Kelurahan Sangiaserri.

DAFTAR REFERENSI

Alimah Akmal, I. (2020). Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Andriani, A. (2021). Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. IAIN Tulungagung.*
- Burhanuddin. (2003). *Manajemen Pendidikan*. Malang: Universitas Negeri Malang. h. 98-100
- Diana Wijayanti, I. (2008). *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, h. 59.
- Hasibuan dan Zainal, A. 2007. *Metodologi Penelitian pada Bidang Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi; Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.
- Hutagalung, J. dkk. 2022. *Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menggunakan Metode ARAS. Jurnal Media Informatika Budidarma.*
- Noor Rizkiyah dan Randy Renny. 2021. *Kajian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.* Fakultas Pertanian, UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Antakusuma.
- Nurmalita Sari, A. (2020). Implementasi Program Batuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi Keluarga Penerima Manfaat Studi Di Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Program Studi Kebijakan Publik.
- Nurul Fatonah, A. dkk. 2019. *Model Good Comunity Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Rejosari Kecamatan Natar Lampung Selatan.* Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
- Peter Salim dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*, Jakarta: Modern English Press, h. 695.
- R. Terry, G. (2013). Dasar-dasar Manajemen, Jakarta: PT Bumi Aksara. h. 168.
- Rachman, B. dkk. 2018. *Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).*
- Risnandar dan Aditya Wisnu Brotu. 2018. *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Indonesia.*
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan r&D).* Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Surya Kharismawati, I. (2018). Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-warong di Kelurahan Wonocolo Surabaya.
- Tondhi, Ramadhan (2018). Efektivitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru.
- Usman, H. (2006). *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, h. 34.